

## Tata Kelola Kolaboratif dalam Layanan Literasi Perpustakaan Umum: Studi Kasus Literasi Squad di Kota Bogor

Margareta Aulia Rachman<sup>1, \*)</sup>, Edy Suryanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>*Department of Library and Information Science, Faculty of Humanities Universitas Indonesia*

<sup>2</sup>*Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor*

\*Korespondensi: [margareta.aulia@ui.ac.id](mailto:margareta.aulia@ui.ac.id)

### *Abstract*

#### ***[Collaborative Governance in Public Library Literacy Services: A Case Study of Literacy Squad in Bogor City]***

*Public libraries are required to develop service innovations that can increase public participation in literacy activities. One approach that can be used is through cross-sector collaboration between the government, community, and external partners. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the Literacy Squad Program at the Bogor City Library. The study used a qualitative approach with a case study method. Data collection was conducted through in-depth interviews with the head of the service, librarians, reading ambassadors, and library users, supported by observation and documentation. Data analysis was conducted through a qualitative coding process that included open coding and axial coding, using the collaborative governance framework by Ansell and Gash, which covers initial conditions, institutional design, facilitative leadership, collaboration processes, and impacts of collaboration. The results show that collaboration in the Literacy Squad Program was formed in response to the need for library services on weekends and limited organizational resources. A clear division of roles between the library, the community (Reading Ambassadors and GenRe Ambassadors), and external partners allows for the implementation of literacy services that are more interactive and responsive to community needs. This collaboration has resulted in various positive impacts, including increased library visits, community involvement in literacy activities, and the development of more diverse literacy facilities and programs. This research demonstrates that a collaborative governance approach can be an effective strategy for developing community-based library services.*

**Keywords:** *collaborative governance; public library; literacy services; community collaboration; Literacy Squad*

### **Abstrak**

Perpustakaan umum dituntut untuk mengembangkan inovasi layanan yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, komunitas, dan mitra eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Program Literasi Squad di Perpustakaan Kota Bogor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan kepala dinas, pustakawan, duta baca, dan pemustaka, serta didukung dengan observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses coding kualitatif yang meliputi open coding dan axial coding, dengan menggunakan kerangka tata kelola kolaboratif dari Ansell dan Gash yang mencakup kondisi awal, desain institusi, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaborasi, dan dampak kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam Program Literasi Squad terbentuk sebagai respons terhadap kebutuhan layanan perpustakaan pada akhir pekan serta keterbatasan sumber daya organisasi. Pembagian peran yang jelas antara perpustakaan, komunitas (Duta Baca dan Duta GenRe), dan mitra eksternal memungkinkan terlaksananya layanan literasi yang lebih interaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi tersebut menghasilkan berbagai dampak positif, antara lain peningkatan kunjungan perpustakaan, keterlibatan komunitas dalam kegiatan literasi, serta pengembangan fasilitas dan program literasi yang lebih variatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan tata kelola kolaboratif dapat menjadi strategi yang efektif dalam pengembangan layanan perpustakaan berbasis komunitas.

**Kata kunci:** tata kelola kolaboratif; perpustakaan umum; layanan literasi; kolaborasi komunitas; Literasi Squad

## 1. Pendahuluan

Perpustakaan umum kini bukan sekadar penyedia koleksi namun menjadi pusat pembelajaran komunitas (*community learning hub*) dan ruang kolaboratif bagi berbagai pemangku kepentingan. Perubahan ini menuntut perpustakaan untuk menyediakan akses informasi, mengembangkan layanan yang adaptif serta membangun kapasitas literasi masyarakat melalui kemitraan strategis dengan berbagai aktor. Penelitian mengenai pendidikan literasi informasi dan media telah berkembang di berbagai sektor profesional. Namun, peran perpustakaan umum dalam mendukung literasi media dan literasi komunitas

Selain itu, Garner (2025) menyoroti bahwa perpustakaan umum semakin dihadapkan pada tuntutan untuk mendukung kelompok rentan, termasuk masyarakat yang mengalami kemiskinan dan tunawisma. Dalam menghadapi kompleksitas kebutuhan sosial tersebut, perpustakaan menjalin kemitraan dengan organisasi non-profit, lembaga pemerintah, dan penyedia layanan sosial lainnya. Perpustakaan sebagai entitas pemerintah daerah harus mengelola asimetri kekuasaan dan sumber daya dalam hubungan kolaboratifnya. Penelitian Sari (2024) menunjukkan kolaborasi yang dijalin dalam penyelenggaraan program melibatkan beberapa stakeholders seperti Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Desa, Pihak swasta, perguruan tinggi, komunitas dan masyarakat dan dinas pendidikan pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Magelang. Dalam penyelenggaraan program yang dilakukan oleh perpustakaan, masyarakat turut membantu dengan berpartisipasi mengikuti kegiatan rapat, pelatihan, senam dan pelatihan menulis, dan lain sebagainya. Pencapaian Dinas Perpustakaan Kabupaten Magelang terhadap komitmennya dengan pemangku kepentingan yang terlibat yaitu terbentuknya persamaan komitmen dan persepsi antar stakeholders untuk terus mendorong penyelenggaraan program dan kegiatan.

Tidak hanya itu penelitian Kinanti et al (2024) tata kelola kolaboratif pada perpustakaan yang terletak di daerah terpencil diperoleh hasil bahwa Taman Bacaan Masyarakat (TBM) memiliki potensi yang besar melalui sumber daya dan program-programnya untuk membantu tugas dinas perpustakaan dalam penyediaan akses perpustakaan di daerah terpencil. Kolaborasi yang paling diharapkan oleh TBM adalah terkait dengan penyediaan koleksi buku. Dengan demikian, terlihat kolaborasi dalam konteks perpustakaan umum tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan praktik tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang melibatkan pembagian peran, pembangunan kepercayaan, serta negosiasi kepentingan antar-aktor. Untuk itu, pendekatan tata kelola kolaboratif menjadi kerangka analitis yang relevan untuk memahami bagaimana perpustakaan membangun kemitraan strategis guna memperkuat layanan literasi.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas tata kelola kolaboratif antar perpustakaan dengan berbagai pihak seperti Pemerintah Kabupaten, Desa, komunitas, organisasi non-profit, universitas sampai taman bacaan masyarakat telah dilakukan. Namun demikian belum ada yang membahas mengenai tata kelola kolaboratif pada penyelenggaraan layanan di perpustakaan umum yang melibatkan program yang sudah ada sebelumnya. Inovasi layanan literasi berbasis kolaborasi mulai berkembang di berbagai daerah. Salah satu inisiatif tersebut adalah Program Literasi Squad di Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, yang menghadirkan layanan literasi Sabtu–Minggu melalui kolaborasi antara Perpustakaan Umum dan Galeri Kota Bogor, Paguyuban Duta Baca, Duta Generasi Berencana (GenRe), serta dukungan pembiayaan awal

dari platform digital seperti Gojek, Grab, dan OVO. Sebelumnya program pemilihan Duta Baca dan Program Duta Generasi Berencana merupakan program yang sudah rutin berjalan dari Pemerintah Kota Bogor. Adanya Program Literasi Squad ini adalah inovasi pengembangan dari program yang sudah ada sebelumnya. Program ini tidak hanya memperluas akses layanan pada akhir pekan, tetapi juga menunjukkan praktik kemitraan lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas pemuda, dan sektor swasta berbasis teknologi.

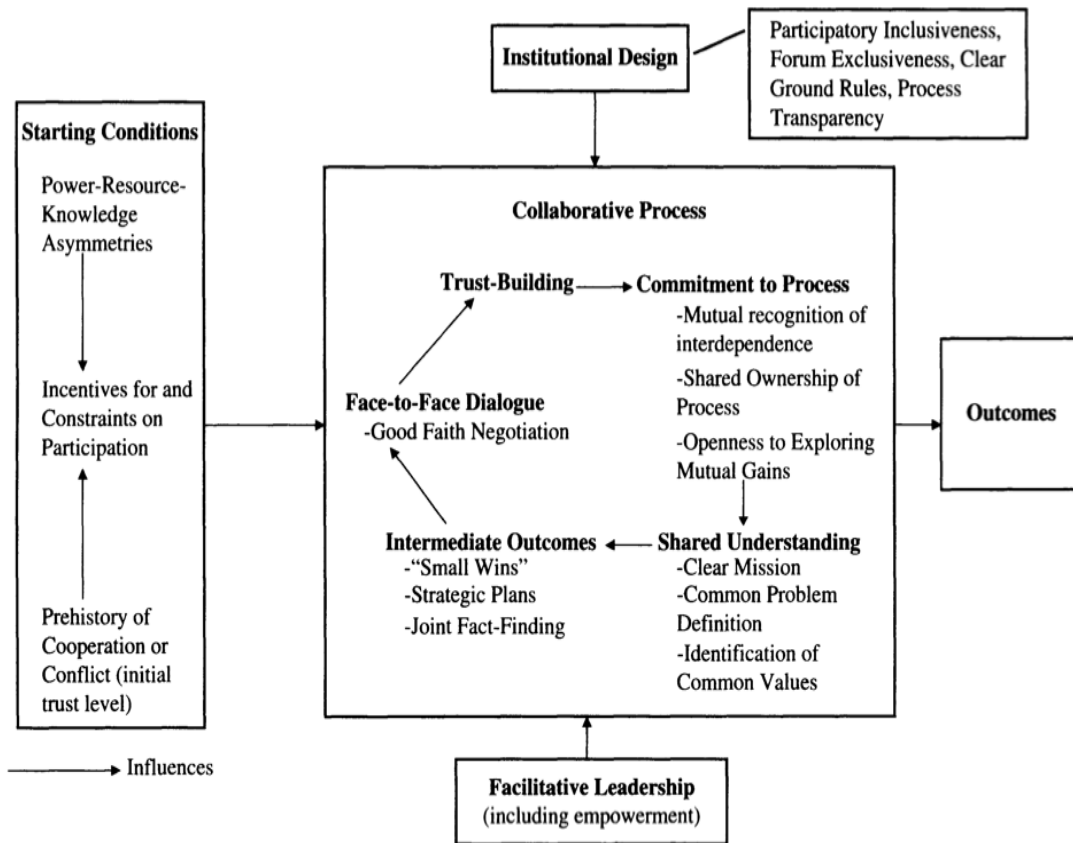
Literasi Squad menghadirkan variasi model kolaborasi karena adanya keterlibatan relawan pemuda sebagai pelaksana layanan langsung, serta dukungan sektor platform digital sebagai katalis awal inovasi layanan. Namun demikian, kajian akademik yang menganalisis praktik kolaboratif semacam ini dalam konteks perpustakaan umum Indonesia masih terbatas, terutama dengan menggunakan perspektif tata kelola kolaboratif sebagai kerangka analisis. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Program Literasi Squad di Perpustakaan Umum dan Galeri Kota Bogor?
2. Bagaimana peran Duta Baca, Duta GenRe, dan platform digital dalam mendukung layanan literasi Sabtu–Minggu?
3. Bagaimana kolaborasi tersebut berkontribusi terhadap penguatan kapasitas layanan perpustakaan umum?

Penelitian ini juga memiliki beberapa implikasi penting. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan konsep tata kelola kolaboratif dalam konteks perpustakaan umum di Indonesia, sekaligus memperkaya diskursus mengenai kolaborasi lintas sektor dalam penguatan literasi komunitas. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengelola perpustakaan daerah dalam merancang strategi kemitraan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Secara kebijakan, hasil penelitian ini memberikan masukan mengenai pentingnya dukungan sektor swasta dan komunitas pemuda dalam inovasi layanan publik berbasis literasi. Selain itu, model kolaborasi yang dihasilkan berpotensi menjadi praktik baik (*best practice*) bagi pengembangan layanan literasi di perpustakaan umum lainnya.

## 2. Landasan Teori

Tata kelola kolaboratif adalah keterlibatan langsung aktor publik dan non-publik dalam proses perencanaan dan implementasi layanan secara deliberatif dan berbasis consensus (Ansell & Gash, 2008). Dalam kerangka ini, kolaborasi tidak sekadar berbentuk dukungan sumber daya, tetapi mencakup pembagian peran, pembangunan kepercayaan, desain kelembagaan yang jelas, serta kepemimpinan fasilitatif yang mampu menyatukan visi bersama. Seperti yang disampaikan oleh Batory & Svensson, (2019) kemitraan dapat terjadi mengikuti prinsip-prinsip teori tata kelola kolaboratif di mana para pemangku kepentingan dari sektor pemerintah dan non-pemerintah terlibat satu sama lain untuk mencapai tujuan publik yang akan sulit dicapai sendiri.



**Gambar 1** A Model of Collaborative Governance dari Ansell & Gash (2008)

Model tata kelola kolaboratif dari Ansell & Gash (2008) di atas menggambarkan tata kelola kolaboratif sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berhubungan secara dinamis. Diagram ini divisualisasikan sebagai alur yang bergerak dari kondisi awal (*starting conditions*) menuju proses kolaboratif (*collaborative process*), dengan dukungan desain kelembagaan (*institutional design*) dan kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), yang kemudian menghasilkan outcomes atau hasil kolaborasi. Garner (2025) menjelaskan model Ansell & Gash (2008) menggambarkan empat variabel kunci yang perlu ada agar hasil yang diinginkan dari kemitraan dapat terwujud: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Kondisi awal, desain kelembagaan, dan elemen kepemimpinan fasilitatif masing-masing merupakan faktor yang berkontribusi pada proses kolaboratif. Kondisi awal adalah faktor kontekstual awal yang membentuk proses tata kelola kolaboratif. Kondisi ini mencakup asimetri kekuasaan dan sumber daya yang sudah ada di antara para pemangku kepentingan, insentif dan kendala untuk berpartisipasi, dan sejarah kerja sama atau konflik di antara pihak-pihak yang terlibat. Kondisi-kondisi pendahulu ini secara signifikan memengaruhi lintasan dan potensi keberhasilan kemitraan kolaboratif potensial.

Elemen desain kelembagaan dari model tersebut menggambarkan kerangka struktural di mana kolaborasi terjadi. Ini mencakup protokol dan aturan dasar yang mengatur proses kolaborasi, menekankan inklusivitas, transparansi, dan kejelasan prosedural. Elemen desain institusional memainkan peran penting dalam mengurangi ketidakseimbangan kekuasaan dan mendorong lingkungan yang kondusif untuk

keterlibatan yang produktif. Elemen masukan terakhir yang berkontribusi pada model Ansell dan Gash adalah kepemimpinan fasilitatif. Elemen kepemimpinan fasilitatif menekankan peran penting kepemimpinan dalam membimbing proses kolaborasi. Bentuk kepemimpinan ini berbeda dari model hierarkis tradisional, melainkan berfokus pada kemampuan untuk menyatukan para pemangku kepentingan, menetapkan dan mempertahankan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama. Pemimpin fasilitatif bertindak sebagai pengelola proses kolaborasi, memastikan integritas dan produktivitasnya sambil menavigasi dinamika kompleks di antara beragam pemangku kepentingan.

Proses kolaboratif ini juga banyak dilakukan pada perpustakaan umum. Perpustakaan umum merupakan pusat akses informasi tradisional, yang menawarkan buku, sumber daya digital, dan program pendidikan untuk mempromosikan literasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan bertindak sebagai pusat komunitas yang terpercaya, menyediakan ruang aman untuk interaksi, mendorong inklusi sosial, dan menjembatani kesenjangan sosial (Igarashi *et al*, 2024).

Studi Nihayati & Pari (2022) tentang pengelolaan SNI Corner di perpustakaan perguruan tinggi yang menunjukkan bagaimana interaksi berbagai agen membentuk struktur sosial dalam pengelolaan layanan perpustakaan. Dalam konteks ini, pengelolaan SNI Corner melibatkan beberapa pihak seperti penginisiasi layanan, pengelola dari BSN, rektor universitas, kepala perpustakaan, dan petugas perpustakaan. Interaksi antara agen-agen ini membangun relasi sosial yang menegakkan struktur tata kelola dan membentuk branding BSN kepada khalayak umum. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif di perpustakaan umum melibatkan koordinasi multi-aktor yang berperan dalam pengelolaan layanan dan penyebaran informasi kepada pengguna, khususnya dalam membangun kesadaran berbudaya standar di kalangan pengguna muda.

Pendekatan kolaboratif ini juga menekankan pentingnya peran berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan bersama, di mana perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan koleksi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan edukasi yang melibatkan berbagai pihak. Dengan demikian, tata kelola kolaboratif pada perpustakaan umum dapat dilihat sebagai proses strukturasi yang melibatkan berbagai agen dengan kepentingan dan peran yang berbeda, yang secara bersama-sama membangun dan mempertahankan sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Tata kelola kolaboratif pada perpustakaan umum melibatkan interaksi dan koordinasi multi-aktor yang membangun struktur sosial pengelolaan layanan perpustakaan, dengan tujuan meningkatkan pemanfaatan informasi dan membangun kesadaran pengguna melalui peran serta berbagai pihak terkait.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus memungkinkan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks (Creswell, 2018). Pendekatan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai proses tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Program Literasi Squad,

peran apa yang terlihat dari Duta Baca, Duta GenRe dan Platform digital dalam mendukung layanan literasi serta kontribusi kolaborasi yang ada di Perpustakaan Umum dan Galeri Kota Bogor.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada pustakawan dan pemustaka untuk mendapatkan gambaran nyata berkaitan program Literasi Squad, peran dari Duta Baca dan Duta GenRe serta platform digital dalam pengembangan layanan literasi Sabtu-Minggu di perpustakaan. Pemilihan informan menggunakan metode purposif sampling, di mana pemilihan informan dipilih berdasarkan tujuan tertentu. Kriteria informan yang dipilih adalah pustakawan bagian layanan. Untuk pemustaka dipilih pemustaka yang sudah datang berkunjung ke Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor lebih dari tiga kali dengan asumsi pemustaka dengan jumlah kedatangan lebih dari tiga kali sudah memahami layanan dan fungsi ruang-ruang yang ada di perpustakaan. Informan penelitian terdiri dari 6 (enam) orang, yang terdiri dari Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor, 1 orang pustakawan, 1 orang duta baca, 1 duta GenRe, dan 2 orang pemustaka. Pustakawan yang menjadi informan adalah pustakawan yang tugasnya sebagai koordinator. Selanjutnya, observasi dan analisis dokumen dilakukan dengan melihat keberlangsungan program Literasi Squad, peraturan dan kebijakan yang ada dan pelaksanaan layanan literasi Sabtu-Minggu.

Pada tahap analisis data dilakukan dengan memisahkan data penelitian. Proses ini adalah suatu proses yang memfokuskan pada sebagian data dan mengabaikan bagian-bagian yang lainnya. Proses ini menggabungkan data menjadi sejumlah kecil tema, yaitu lima sampai tujuh tema (Creswell, 2018). Langkah ini meliputi pembuatan kategori atas informasi yang diperoleh (*open coding*), memilih salah satu kategori dan menempatkannya dalam satu model teoritis (*axial coding*), lalu merangkai sebuah cerita dari hubungan antar kategori ini (*selective coding*). Kemudian dilanjutkan pada tahap paling akhir dari proses penelitian yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan yaitu pernyataan umum dan logis yang ditarik dari beberapa kasus dan menunjukkan ciri-ciri dari kasus tersebut. Kesimpulan juga merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu berkaitan dengan keberlangsungan program Literasi Squad dan layanan literasi Sabtu-Minggu di Perpustakaan Umum Kota Bogor.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor merupakan bagian dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor yang merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dan perpustakaan di wilayah Kota Bogor. Dinas ini berfokus pada pengelolaan dan pemeliharaan arsip-arsip penting serta menyediakan layanan perpustakaan yang mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi dan pengetahuan kepada publik, Dinas ini juga menyelenggarakan berbagai program literasi dan pengembangan sumber daya manusia melalui fasilitas perpustakaan yang ada. Sebagai salah satu pusat pembelajaran (*learning center*) yang ada di Kota Bogor, Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor berusaha memberikan kontribusi aktif dalam upaya membangun minat dan kebiasaan membaca masyarakat Kota Bogor. Hal ini tercermin dari visi yaitu “Meningkatkan budaya baca masyarakat”.

Adapun koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan ini berdasarkan website resmi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bogor pada Maret 2026, sebanyak 27.436 judul dengan jumlah total 62.700 Eksemplar buku tercetak, Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sekolah Dasar (SD) sebanyak 349 judul, Buku Sekolah Elektronik (BSE) Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 226 judul, Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 110 judul dan koleksi umum sebanyak 228 judul. Layanan yang ada di Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor di antaranya layanan Perpustakaan Keliling, Sirkulasi, Referensi, Multimedia, Disabilitas, Keanggotaan, Perpustakaan Digital (iBogor), Anak dan Pendidikan Pemustaka. Pengembangan minat membaca masyarakat Kota Bogor juga dilakukan dengan berbagai kegiatan yang rutin dilaksanakan seperti Sosialisasi Budaya Baca, Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial, Story Telling, Workshop Perpustakaan, Pembinaan Perpustakaan, Pelatihan Dongeng, Lomba Mendongeng, Lomba Bercerita, Lomba Perpustakaan Sekolah.

Salah satu program kegiatan baru sebagai penguat kegiatan literasi di Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor adalah Literasi Squad.

Literasi Squad adalah program penambahan jam buka perpustakaan di hari Sabtu dan Minggu yang bekerja sama dengan relawan dan komunitas. Literasi Squad diresmikan oleh Walikota Bogor periode 2014–2024, Dr. Bima Arya pada 11 Maret 2023. Literasi Squad terdiri dari Paguyuban Duta Baca Kota Bogor dan Duta Generasi Berencana yang bertugas di perpustakaan pada hari Sabtu dan Minggu dan berkolaborasi dengan pihak swasta (Gojek, Grab dan Ovo) untuk pembiayaan berupa pengganti uang transportasi. Penelitian ini menganalisis proses tata kelola kolaboratif yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008), dengan mendeskripsikan kondisi awal kerja sama perpustakaan dan mitra, mengidentifikasi desain pembagian peran, melihat dinamika interaksi antar-aktor, serta mengidentifikasi dampak layanan ini.

#### **4.1. Kondisi Awal**

Kondisi awal dalam model tata kelola kolaboratif menjelaskan kondisi awal yang mendorong terbentuknya kolaborasi. Program Literasi Squad muncul pada Maret 2023 sebagai respons terhadap masukan masyarakat agar perpustakaan membuka layanan Sabtu–Minggu serta tingginya potensi kunjungan keluarga pada akhir pekan. Data menunjukkan kunjungan ke Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor mengalami peningkatan sejak resmi beroperasi di gedung layanan yang baru pada 17 Desember 2022. Pada bulan Desember 2022 rata-rata pengunjung perhari adalah 460 orang dan Januari 2023 rata-rata pengunjung perhari 418 orang. Namun, pada bulan Februari 2023 pengunjung perpustakaan rata-rata perhari mengalami penurunan jumlah pengunjung yang signifikan yaitu 339 orang atau turun 20–26% dari 2 bulan sebelumnya.

Pada saat itu layanan di perpustakaan tidak dapat dibuka di hari Sabtu dan Minggu, salah satu faktor utama adalah jadwal operasional perpustakaan yang hanya buka di hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 15.00 yang menyebabkan beberapa pelajar atau pengunjung keluarga tidak dapat berkunjung. Berdasarkan

wawancara informan, terlihat banyak masyarakat menginginkan layanan perpustakaan dibuka di hari libur. Berikut kutipan wawancara dengan informan:

*“.....banyak masukan dan komentar dari masyarakat bahwa layanan publik seperti perpustakaan harus buka sabtu-minggu, dan antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan di hari Sabtu–Minggu.....Kami ingin mengubah persepsi bahwa perpustakaan hanya tempat membaca menjadi ruang interaksi, kolaborasi, dan ekspresi.” (Informan Wahyu)*

Berdasarkan wawancara terlihat tantangan awal muncul dari perbedaan pengalaman dan pemahaman sistem layanan perpustakaan, namun hal tersebut di atasi melalui pendampingan dan pembelajaran bersama. Selain itu, kondisi awal yang terjadi berdasarkan wawancara, perpustakaan tutup di hari Sabtu dan Minggu karena anggaran yang ada untuk membuka layanan di hari Sabtu dan Minggu tidak tersedia pada pos anggaran yang ada.

*“...Beberapa kebutuhan strategis saat itu adalah kunjungan akhir pekan belum terlaksana, keterbatasan SDM ASN untuk kegiatan interaktif di luar jam kerja efektif, perlu pendekatan yang lebih dekat dengan Gen Z dan berbagai komunitas, keterbatasan anggaran...” (Informan Wahyu)*

Dari wawancara di atas terlihat ada keterbatasan sumber daya dari pemerintah daerah dalam hal ini Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Keterbatasan tersebut kemudian mendorong perpustakaan untuk mencari solusi melalui kemitraan dengan pihak eksternal. Disinilah dimulainya kemitraan lintas sektor di mana ada kolaborasi pemerintah, komunitas dan swasta. Temuan ini sejalan dengan argumen Ansell dan Gash (2008) yang menyatakan bahwa kolaborasi sering kali muncul sebagai respons terhadap keterbatasan kapasitas organisasi publik dalam menyediakan layanan secara mandiri. Dengan demikian, kebutuhan layanan masyarakat dan keterbatasan sumber daya organisasi menjadi faktor pendorong utama terbentuknya kemitraan dalam Program Literasi Squad. Dari sudut pandang komunitas, motivasi individu relawan menjadi faktor penting dalam awal kolaborasi. Duta Baca terlibat karena keinginan mengembangkan keterampilan sosial, memperluas jaringan, dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Hal ini terlihat dari kutipan wawancara berikut:

*“.....ingin memperluas segala keterampilan dalam diri, terutama dalam bersosialisasi agar dapat menambah networking maupun mengasah skill keberanian di depan umum.” (Informan Ani)*

Contoh praktik kolaborasi juga terlihat pada penelitian Winastwan & Fatwa (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh perpustakaan Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan literasi budaya masyarakat meliputi, menyediakan layanan khusus perpustakaan yang memuat koleksi *local content* dan melakukan kerja sama dengan instansi lain. Oleh karena itu, pengembangan dan dukungan berbagai pihak terhadap perpustakaan umum sangat diperlukan untuk memperkuat perannya dalam menciptakan masyarakat yang literat dan berpengetahuan.

## 4.2. Desain pembagian peran

Pada model Ansell dan Gash (2008), institutional design merupakan struktur yang mengatur bagaimana kolaborasi dijalankan. Pada program Literasi Squad, desain kelembagaan terlihat dari adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Literasi Squad adalah petugas yang melayani perpustakaan pada hari Sabtu dan Minggu di Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor yang terdiri Paguyuban Duta Baca Bogor dan Duta Generasi Berencana berjumlah 30 orang.

Meskipun tidak menggunakan MoU formal, adanya mekanisme koordinasi dan evaluasi rutin menunjukkan adanya aturan partisipasi dan proses deliberatif yang memungkinkan setiap aktor menjalankan perannya secara terkoordinasi. Oleh karena itu, dinas menginisiasi kolaborasi dengan komunitas pemuda, yaitu Duta Baca dan Duta GenRe, serta menggandeng perusahaan digital seperti Gojek, Grab, dan OVO melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembiayaan kegiatan. Selain itu, perpustakaan sebelumnya telah memiliki pengalaman bekerja sama dengan komunitas literasi lokal, sehingga terdapat modal sosial dan kepercayaan awal yang mempermudah pembentukan kemitraan baru. Dalam kolaborasi ini juga terdapat perbedaan sumber daya antar-aktor, yaitu pemerintah menyediakan fasilitas dan kewenangan, komunitas menyediakan kreativitas dan jaringan pemuda, sedangkan platform digital memberikan dukungan pembiayaan serta promosi. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan:

*“...Untuk pembiayaan kegiatan Sabtu–Minggu, kami membangun komunikasi dengan pihak swasta melalui skema CSR dari platform digital seperti Gojek, Grab, OVO. Kolaborasi ini berjalan selama 2 tahun dengan memberikan insentif kepada literasi squad dengan dalam bentuk nominal 1 orang mendapatkan insentif 250.000/bulan (Informan Wahyu)*

*“Perpustakaan Kota Bogor sudah terbiasa bekerja sama dengan komunitas baca, sekolah, dan pegiat literasi lokal. Namun kolaborasi dengan perusahaan berbasis digital merupakan terobosan baru karena melibatkan dukungan pembiayaan dan promosi digital misalnya perusahaan tersebut bisa beriklan melalui videotron di perpustakaan” (Informan Wahyu)*

Institutional desain juga terlihat pada pembagian peran dalam program ini ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara para pihak. Pustakawan terlibat menyusun jadwal kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi program. Literasi Squad yang terdiri dari Duta Baca dan Duta GenRe bertugas menjalankan layanan literasi pada hari Sabtu dan Minggu. Hal ini terlihat pada wawancara dengan informan, sebagai berikut:

*“...saya terlibat dalam pendampingan operasional program Literasi Squad...Peran saya itu melakukan koordinasi dengan anggota Literasi Squad terkait pembagian tugas layanan, memberikan arahan mengenai standar pelayanan perpustakaan, serta memastikan kegiatan literasi seperti layanan sirkulasi, pendampingan pengunjung, dan aktivitas literasi berjalan sesuai dengan prosedur perpustakaan, dan pembagian jadwal per bulan...” (Informan Budi)*

*“Duta Baca biasanya berperan dalam kegiatan promosi literasi, seperti mengajak pengunjung membaca atau mengikuti kegiatan storytelling dan diskusi buku. Sementara itu, Duta GenRe sering membantu dalam pendekatan kepada pengunjung muda dan pelajar.(Informan Budi)*

*“....arahan terkait koleksi, layanan perpustakaan, serta membantu mereka memahami bagaimana cara melayani pengunjung secara baik.” (Informan Budi)*

Berdasarkan wawancara di atas terlihat institional desain pada keterlibatan pustakawan pada peran operasional pustakawan, koordinasi tugas layanan, serta pengawasan dan kontrol kualitas layanan. Peran relawan dalam layanan sangat membantu dalam memberikan informasi. Selain itu kontribusi komunitas literasi, dengan menggunakan pendekatan pada generasi muda dengan strategi layanan berbasis komunitas. Berdasarkan coding wawancara pustakawan, program Literasi Squad menunjukkan proses tata kelola kolaboratif yang berjalan efektif pada level operasional. Pustakawan berperan sebagai fasilitator dan pengawas layanan, sementara relawan komunitas memberikan energi, kreativitas, dan pendekatan baru kepada pengunjung. Interaksi yang intensif dan kepercayaan yang terbentuk memungkinkan kolaborasi ini menghasilkan dampak positif terhadap layanan perpustakaan. Di sana juga terlihat kepercayaan antara pustakawan dan relawan. Sementara itu beberapa platform digital juga ikut memberikan dukungan pembiayaan kegiatan serta membantu publikasi program melalui media sosial.

*“Koordinasi dilakukan melalui rapat persiapan sebelum kegiatan akhir pekan dan evaluasi bulanan dengan indikator utama peningkatan kunjungan dan respons masyarakat terhadap layanan.” (Informan Budi)*

Pembagian peran yang jelas antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta menunjukkan bahwa desain kelembagaan dalam program ini mampu menciptakan mekanisme kerja yang terkoordinasi. Hal ini sesuai dengan pandangan Ansell dan Gash (2008) bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh adanya aturan partisipasi yang jelas, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta pembagian tanggung jawab yang seimbang antar-aktor. Hal ini sesuai dengan konsep Ansell dan Gash (2008), kepemimpinan fasilitatif merupakan elemen penting dalam model tata kelola kolaboratif karena berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi, membangun kepercayaan, serta menjaga komitmen antar-aktor. Dalam konteks Program Literasi Squad, pimpinan perpustakaan memainkan peran sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Berikut adalah kutipan wawancara dengan informan:

*“Tentu ada...Pemerintah kewenangan, fasilitas gedung. Komunitas/Duta sebagai kreativitas, jejaring remaja dan Platform digital memberikan dukungan pembiayaan dan eksposur media sosial”. (Informan Wahyu)*

Berdasarkan hasil wawancara, pimpinan perpustakaan memberikan ruang bagi komunitas pemuda untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program, sekaligus memastikan bahwa kegiatan yang

dilakukan tetap sejalan dengan tujuan organisasi. Pendekatan kepemimpinan yang inklusif ini memungkinkan munculnya ide-ide kreatif dari relawan, seperti kegiatan storytelling, diskusi literasi, dan aktivitas edukatif lainnya yang menarik bagi pengunjung perpustakaan. Selain itu, kepemimpinan fasilitatif juga tercermin dalam upaya pimpinan perpustakaan untuk menjaga komunikasi yang terbuka antara pustakawan dan relawan. Melalui mekanisme koordinasi yang rutin, potensi konflik dapat diminimalkan dan hubungan kerja sama dapat dipertahankan secara konstruktif. Temuan ini memperkuat argumentasi Ansell dan Gash (2008) bahwa kepemimpinan fasilitatif berperan penting dalam memastikan keberlangsungan proses kolaboratif. Hal ini juga sejalan hasil penelitian Garner (2025) yang menemukan bahwa perpustakaan umum menyediakan akses ke layanan, ruang, dan sumber daya perpustakaan, bersama dengan tautan ke penyedia layanan eksternal, dan bertindak sebagai titik distribusi untuk barang-barang yang disumbangkan. Sebagai entitas pemerintah daerah, perpustakaan umum melakukan kegiatan tata kelola kolaboratif dengan membentuk kemitraan dengan organisasi nirlaba yang dipimpin komunitas, organisasi nirlaba dan amal berskala besar, dan penyedia layanan pemerintah.

#### 4.3. Dinamika interaksi antar-aktor

Proses kolaboratif merupakan inti dari model tata kelola kolaboratif. Dalam Program Literasi Squad, proses ini terlihat melalui berbagai bentuk interaksi antara aktor yang terlibat, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Dalam model tata kelola kolaboratif, proses kolaborasi terdiri dari beberapa tahapan seperti dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama. Dinamika interaksi pada Literasi Squad menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif dari pihak perpustakaan berperan penting dalam menjaga komunikasi dan membangun rasa kepemilikan bersama terhadap program. Hal ini memperkuat kepercayaan antar-aktor dan menjaga keberlanjutan kolaborasi. Berikut adalah kutipan wawancara dengan informan:

*“Kepercayaan dibangun melalui komunikasi formal dan informal. Kami menegaskan bahwa program ini murni untuk peningkatan literasi masyarakat Kota Bogor, dengan laporan kegiatan dan penggunaan dukungan yang transparan. Sebagai institusi pemerintah daerah, kami menjaga akuntabilitas agar kerja sama tetap sesuai regulasi”. (Informan Wahyu)*

*“Koordinasi teknis biasanya dilakukan melalui briefing singkat sebelum layanan dimulai. Dalam briefing tersebut kami membahas pembagian tugas, agenda kegiatan literasi yang akan dilaksanakan, serta hal-hal teknis terkait pelayanan kepada pengunjung”. (Informan Budi)*

*“...komunikasi juga dilakukan melalui grup whatsapp untuk memudahkan koordinasi, baik sebelum kegiatan maupun ketika ada kebutuhan mendadak saat layanan berlangsung” (informan Budi)*

Berdasarkan wawancara terlihat kepercayaan antara pustakawan dan relawan terbentuk melalui komunikasi terbuka, pembagian tugas yang jelas, serta komitmen relawan dalam menjalankan program.

Selain itu proses kolaborasi terlihat melalui briefing rutin, komunikasi digital melalui WhatsApp, serta interaksi langsung antara pustakawan dan relawan. Proses ini membantu membangun koordinasi dan kepercayaan antar-aktor. Untuk itu penting untuk menjaga transparansi dalam semua upaya kolaborasi untuk membangun kepercayaan dan legitimasi di antara para pemangku kepentingan (Eggleston, Donahue & Zeckhauser, 2021).

Pustakawan dan relawan melakukan koordinasi sebelum kegiatan berlangsung melalui briefing singkat untuk membahas pembagian tugas dan agenda kegiatan. Selain itu, komunikasi juga dilakukan secara informal melalui grup pesan instan untuk memudahkan koordinasi selama program berlangsung. Mekanisme komunikasi ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat serta meningkatkan efektivitas kerja tim. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Prysmakova-Rivera & Pysmenna (2021) yang mendorong tanggung jawab dan akuntabilitas bersama di antara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam tata kelola kolaboratif. Prinsip ini memastikan bahwa semua pihak sama-sama berinvestasi dalam keberhasilan inisiatif tersebut.

Dari perspektif pemustaka, kehadiran relawan literasi memberikan pengalaman layanan yang lebih ramah dan interaktif. Meskipun interaksi antara pemustaka dan relawan tidak selalu intensif, keberadaan mereka dinilai membantu dalam memberikan informasi mengenai kegiatan literasi dan layanan perpustakaan. Proses interaksi yang berkelanjutan ini menunjukkan adanya dinamika kolaboratif yang konstruktif, di mana setiap aktor memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini sejalan dengan konsep face-to-face dialogue, trust building, dan commitment to process dalam model tata kelola kolaboratif. Program Literasi Squad memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan perpustakaan pada akhir pekan. Kehadiran relawan membantu meningkatkan responsivitas layanan dan membuat perpustakaan lebih aktif sebagai ruang literasi masyarakat. Namun demikian, pengunjung juga menyoroti pentingnya peningkatan promosi agar masyarakat lebih mudah mengetahui jadwal program dan berpartisipasi secara lebih luas.

*“Interaksinya sangat baik. Teman-teman Duta Baca sangat komunikatif, ramah, dan membantu dengan baik ketika kami membutuhkan informasi. Kolaborasi dengan Duta Baca/Duta GenRe membuat kegiatan literasi di Perpustakaan lebih hidup dan lebih akrab”. (Informan Ana)*

*“Saya berkomunikasi tidak terlalu intens dengan teman-teman Duta Baca, tapi kehadiran mereka cukup membantu pemberian informasi atau kegiatan di Perpustakaan”. (Informan Dinda)*

*“Komunikasi sangat baik, karena interaktif antara literasi squad maupun pihak perpustakaan sangat terbuka dan membantu....Alhamdulillah saya di percaya sebagai wakil ketua literasi squad batch I.” (Informan Eni)*

#### 4.4. Dampak Program Literasi Squad

Elemen terakhir dalam model tata kelola kolaboratif adalah, yaitu hasil yang dihasilkan dari proses kolaborasi. Berdasarkan hasil penelitian, Program Literasi Squad memberikan beberapa dampak positif terhadap layanan perpustakaan. Ansell dan Gash (2008) menyatakan hasil kolaborasi sering muncul dalam bentuk *intermediate outcomes*, yaitu capaian awal yang memperkuat legitimasi dan keberlanjutan kerja sama. Peningkatan kunjungan perpustakaan dan partisipasi komunitas menunjukkan bahwa kolaborasi ini menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Layanan perpustakaan pada hari Sabtu dan Minggu adalah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses ke sumber daya perpustakaan bagi masyarakat yang memiliki jadwal kerja dan kewajiban sehari-hari. Dengan membuka layanan pada akhir pekan, lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk memanfaatkan koleksi buku, majalah, dan sumber daya lainnya yang tersedia di perpustakaan.

Pertama, program ini berhasil meningkatkan jumlah kunjungan perpustakaan pada akhir pekan. Pengunjung menyatakan bahwa layanan Sabtu–Minggu memberikan kesempatan yang lebih fleksibel bagi masyarakat yang tidak dapat mengunjungi perpustakaan pada hari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi layanan yang dilakukan melalui kolaborasi mampu memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas perpustakaan. Data kunjungan perpustakaan pada bulan Februari 2023 tercatat 6.291 pemustaka datang ke perpustakaan, meningkat pada bulan Maret di tahun yang sama menjadi 11.464 pemustaka. Lonjakan pengunjung yang sangat signifikan terjadi pada bulan Maret 2023 karena program Literasi Squad sedang pada masa awal pembukaan program sehingga promosi dilakukan dengan sangat masif. Hasilnya terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1** Peningkatan Jumlah Kunjungan Dampak dari Program Literasi Squad

Jenis kelamin	Januari	Februari	Maret
Laki-laki	3.694	3.985	4.846
Perempuan	5.084	2.306	6.618
Jumlah	8.778	6.291	<b>11.464</b>

Kedua, kehadiran relawan literasi menciptakan suasana perpustakaan yang lebih aktif dan interaktif. Kegiatan literasi yang melibatkan komunitas pemuda tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat citra perpustakaan sebagai ruang publik yang inklusif dan dinamis. Ketiga, program ini memberikan manfaat bagi pengembangan kapasitas relawan. Duta Baca yang terlibat dalam program ini menyatakan bahwa mereka memperoleh pengalaman berharga dalam berkomunikasi dengan masyarakat, mengelola kegiatan literasi, serta mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan pemecahan masalah. Keempat, dari perspektif pemustaka, program ini meningkatkan kualitas layanan

informasi yang diberikan oleh perpustakaan. Relawan membantu pemustaka dalam menemukan informasi yang dibutuhkan serta memberikan rekomendasi kegiatan literasi yang dapat diikuti.

Program Literasi Squad juga berkontribusi pada penguatan kapasitas layanan pada Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, di antaranya:

### 1. Program dan Acara Khusus

Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor mengadakan acara di hari Sabtu dan Minggu. Tidak hanya itu, pada hari Sabtu dan Minggu terselenggara lokakarya atau seminar tentang topik tertentu seperti penulisan kreatif, penelitian, keterampilan digital, atau keterampilan hidup lainnya. Hal ini terjadi karena komunitas diberikan ruang untuk dapat melaksanakan kegiatan di perpustakaan pada hari Sabtu dan Minggu. Acara lainnya adalah terbentuknya Klub Buku. Acara ini merupakan pertemuan klub buku di mana anggota dapat berdiskusi tentang buku yang mereka baca. Kegiatan lainnya adalah kegiatan membaca bersama, mendongeng, atau kerajinan tangan yang melibatkan orang tua dan anak-anak. Berikut adalah contoh poster kegiatan Pancar Bora: Perpustakaan membacakan nyaring bersama Bora, yang berlangsung di Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor pada hari Minggu (lihat Gambar 2).



**Gambar 2.** Kegiatan Komunitas Bogor Read a loud di Minggu ke-4 Setiap Bulan

### 2. Fasilitas dan Layanan Tambahan

Dampak dari implementasi kolaborasi dalam Program Literasi Squad tidak hanya terlihat pada peningkatan aktivitas layanan, tetapi juga pada pengembangan berbagai fasilitas pendukung yang meningkatkan kenyamanan pengunjung perpustakaan. Dalam kerangka tata kelola kolaboratif, capaian ini dapat dipahami sebagai dampak kolaborasi (*collaborative outcomes*), yaitu hasil nyata dari proses kerja sama antara pemerintah, komunitas, dan mitra lainnya dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Salah satu dampak yang dirasakan adalah tersedianya area baca yang nyaman dan tenang, dilengkapi dengan

pencapaian yang baik sehingga mendukung aktivitas membaca dan belajar secara lebih optimal. Fasilitas ini memberikan pengalaman ruang belajar yang kondusif bagi pengunjung yang ingin memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat membaca, berdiskusi, maupun mengerjakan tugas

Selain itu, perpustakaan juga menyediakan kafe dan area baca outdoor yang memungkinkan pengunjung menikmati suasana membaca yang lebih santai dan fleksibel. Kehadiran fasilitas ini tidak hanya memberikan pilihan ruang bagi pengunjung, tetapi juga mendorong mereka untuk menghabiskan waktu lebih lama di perpustakaan. Dengan tersedianya makanan dan minuman ringan di area kafe, perpustakaan menjadi ruang publik yang lebih ramah dan menarik bagi berbagai kelompok masyarakat, khususnya generasi muda.

Fasilitas lain yang mendukung peningkatan layanan adalah akses Wi-Fi gratis bagi pengunjung. Penyediaan akses internet ini memungkinkan pengguna untuk memperoleh informasi secara daring, mengakses sumber belajar digital, serta mendukung aktivitas literasi digital. Dalam konteks transformasi perpustakaan modern, fasilitas Wi-Fi gratis menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat fungsi perpustakaan sebagai pusat akses informasi dan pembelajaran masyarakat. Dengan demikian, keberadaan fasilitas tambahan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi yang dibangun dalam Program Literasi Squad tidak hanya menghasilkan inovasi program literasi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan belajar dan pengalaman pengguna di perpustakaan. Hal ini selaras dengan penelitian Aidi et al (2024) yang menunjukkan digitalisasi layanan publik melalui tata kelola kolaboratif dapat meningkatkan kualitas dan inklusivitas layanan, seperti yang terlihat pada inisiatif kota pintar Jakarta. Pendekatan inklusif berdampak positif pada tata kelola kolaboratif yang mengarah pada penyampaian layanan publik digital yang lebih baik. Hal ini senada dengan penelitian Apriliya & Ali (2024) yang menunjukkan bahwa perpustakaan umum memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat melalui berbagai layanan dan program yang diselenggarakan. Perpustakaan menyediakan akses gratis ke berbagai sumber informasi yang beragam, termasuk koleksi pengetahuan umum, keagamaan, ilmu sosial, majalah, dan koran, yang dapat menunjang peningkatan kemampuan membaca dan memahami informasi masyarakat.

### **3. Kerjasama dan kemitraan**

Dampak lain dari implementasi kolaborasi dalam Program Literasi Squad dapat dilihat dari terbentuknya berbagai bentuk kerja sama dan kemitraan strategis antara perpustakaan dengan berbagai pihak. Dalam perspektif tata kelola kolaboratif, kemitraan ini merupakan bagian dari dampak kolaborasi (*collaborative outcomes*), yaitu hasil nyata dari proses interaksi dan kerja sama antar-aktor yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Salah satu bentuk kolaborasi yang berkembang adalah kerja sama dengan sekolah dan universitas, yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. Melalui kerja sama ini, berbagai kegiatan edukatif seperti kunjungan literasi, diskusi buku, serta program pembelajaran berbasis perpustakaan dapat diselenggarakan secara kolaboratif sehingga memperluas peran perpustakaan dalam mendukung proses pendidikan. Tata kelola kolaboratif

dapat menghasilkan inovasi, peningkatan efisiensi operasional, peningkatan partisipasi publik, serta peningkatan kualitas dan aksesibilitas (Sandra et al, 2025).

Namun demikian, tantangan umum yang mungkin muncul pada program tata kelola kolaboratif seperti yang terjadi di Hubei pada program layanan membaca di daerah pedesaan meliputi komunikasi yang kurang memadai, kurangnya koordinasi, dan sumber daya yang tidak mencukupi. Solusinya meliputi menciptakan mekanisme insentif, meningkatkan kepemimpinan, dan menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan (Xie et al, 2022).

Selain itu, perpustakaan juga menjalin kemitraan dengan komunitas lokal untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Keterlibatan komunitas menjadi penting karena mampu menghadirkan aktivitas literasi yang lebih kreatif dan partisipatif. Salah satu contoh nyata dari kolaborasi ini adalah kegiatan Komunitas Dongeng Kota Hujan yang secara rutin menyelenggarakan kegiatan mendongeng pada minggu pertama setiap bulan di perpustakaan (lihat Gambar 3). Kegiatan tersebut tidak hanya menarik minat anak-anak dan keluarga untuk berkunjung ke perpustakaan, tetapi juga memperkuat fungsi perpustakaan sebagai ruang publik yang mendukung pengembangan budaya literasi di masyarakat. Dengan demikian, berbagai bentuk kemitraan yang terjalin menunjukkan bahwa kolaborasi yang dibangun dalam Program Literasi Squad mampu memperluas jaringan kerja sama serta meningkatkan partisipasi komunitas dalam kegiatan literasi di perpustakaan. Hal ini juga menambahkan hasil penelitian Sabolović-Krajina (2020) yang menunjukkan perpustakaan memainkan peran penting dalam literasi kesehatan dengan berkolaborasi dengan organisasi kesehatan lokal untuk mendidik dan melibatkan masyarakat.



**Gambar 3.** Kegiatan Komunitas Dongeng Kota Hujan di Minggu ke-1 Setiap Bulan

## 5. Simpulan

Program Literasi Squad menunjukkan proses tata kelola kolaboratif yang berjalan efektif pada level operasional. Pustakawan berperan sebagai fasilitator dan pengawas layanan, sementara relawan komunitas memberikan energi, kreativitas, dan pendekatan baru kepada pengunjung. Interaksi yang intensif dan kepercayaan yang terbentuk memungkinkan kolaborasi ini menghasilkan dampak positif terhadap layanan perpustakaan. tata kelola kolaboratif dalam layanan literasi perpustakaan umum sangat penting untuk mengatasi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan meningkatkan penyampaian layanan. Dengan membentuk kemitraan strategis, dan mendorong praktik inklusif, perpustakaan dapat meningkatkan dampaknya dan melayani masyarakatnya dengan lebih baik.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan untuk keberlanjutan program. Salah satunya adalah kebutuhan untuk meningkatkan promosi kegiatan literasi agar masyarakat dapat mengetahui jadwal kegiatan secara lebih jelas. Selain itu, perlu adanya dukungan kebijakan yang lebih kuat untuk memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Penting untuk mengembangkan praktik dan kebijakan berkelanjutan yang memastikan keberhasilan jangka panjang dari upaya kolaboratif. Ini termasuk menciptakan kebijakan yang mengikat dan memupuk kepercayaan dan kemitraan di antara para pemangku kepentingan (Sandra et al, 2025). Adanya komitmen jangka panjang merupakan upaya mempertahankan kerjasama dengan konsisten untuk mengatasi kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak ada informan dari platform digital (Gojek, Grab dan Ovo) sebagai pemberi dukungan pembiayaan awal. Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan mengenai kolaborasi dalam pemberian dana atau *crowdfunding* pada pengelolaan perpustakaan.

## Daftar Pustaka

- Aidi, A., Avianti, I., Koeswayo, P. S., Poulus, S., & Mariam, S. 2024. "The Effect Of An Inclusive Approach To Collaborative Governance And Its Impact On Digitizing The Quality of Public Services". *Cogent Business & Management*, Vol. 11 No. 1. <https://remote-lib.ui.ac.id:2075/10.1080/23311975.2024.2392324>
- Ansell, C., & Gash, A. 2008. "Collaborative Governance In Theory and Practice". *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 18 No. 4, 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Apriliya, D. and Ali, M. N. (2024) "Upaya Perpustakaan Umum Kota Tebing Tinggi Dalam Peningkatan Literasi Informasi Melalui Program Ngopi Literasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 8 No. 2, pp. 160-173. doi: 10.38043/jids.v8i2.5409.
- Batory, A., & Svensson, S. 2019. "The Fuzzy Concept of Collaborative Governance: A Systematic Review of The State Of The Art". *Central European Journal of Public Policy*, Vol. 13 No. 2, pp. 28–39. <https://doi.org/10.2478/cejpp-2019-0008>
- Creswell, J. W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Los Angeles: SAGE Publications

- Eggleston, K., Donahue, J. D., & Zeckhauser, R. J. 2021. *The Dragon, the Eagle, and the Private Sector: Public-Private Collaboration in China and the United States*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Garner, J. 2025. "Collaborative Governance In Public Libraries: Partnerships Supporting Vulnerable Library Users". *Journal Of The Australian Library And Information Association* , Vol. 74 No. 1, pp 4–23 <https://doi.org/10.1080/24750158.2024.2397940>
- Igarashi, T., Johnston, J., Koizumi, M. 2024. Community Members' Perspective on Public Libraries as Places to Overcome Social Divisions: A Case Study in Oslo. In: Sserwanga, I., et al. *Wisdom, Well-Being, Win-Win*. iConference 2024. Lecture Notes in Computer Science, vol 14597. Springer, Cham. [https://remote-lib.ui.ac.id:2075/10.1007/978-3-031-57860-1\\_22](https://remote-lib.ui.ac.id:2075/10.1007/978-3-031-57860-1_22)
- Kerrigan, P., McGuinness, C., Fulton, C., Siapera, E., Carrie, D., & Pope, P. 2023." Designing a Media Literacy Training Programme for Public Library Staff in Ireland: Preliminary Results and Observations of a University-Public Library Collaboration". *Public Library Quarterly*, Vol. 42 No. 2, 168–189. <https://doi.org/10.1080/01616846.2022.2062200>
- Kinanti, K., Sulastari, I., Yulianti, S. 2024. "Kolaborasi Perpustakaan Umum Dan TBM Dalam Penyediaan Akses Koleksi Perpustakaan Bagi Masyarakat Daerah Terpencil". *Media Pustakawan*, Vol. 30 No. 3, 295-309 DOI: 10.37014/medpus.v30i3.4988
- Nihayati, N., Pari, F. 2022. "Tata Kelola SNI Corner: Tinjauan dari Perspektif Strukturasi Ekonomi Politik Media". *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, Vol. 8 No. 1, 1-12. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v8i1.36789>
- Prismakova-Rivera, S., Pysmenna, O. 2021. Collaborative governance: Processes, benefits and outcomes. *Handbook of Theories of Public Administration and Management*.
- Sabolović-Krajina, D. 2020. 10 The Public Library as a Leader in Health Literacy: The Croatian Experience. In P. Dalrymple & B. Galvin (Ed.), *Growing Community Health Literacy through Libraries: Sharing Global Perspectives*, pp. 191-206. Berlin, Boston: De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110362640-013>
- Sandra, C et. al. 2025. Uncovering the Dynamics of Collaborative Governance in Health Program Implementation: A Scoping Review *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*. *Review*. DOI: 10.47836/mjmhs.21.s7.25
- Winastwan, R. E., & Fatwa, A. N. 2021. "Strategi Perpustakaan Umum Dalam Meningkatkan Literasi Budaya Masyarakat". *TADWIN: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, Vol. 2 No. 1, pp. 13-21. <https://doi.org/10.19109/tadwin.v2i1.7435>
- Xie, J., Li, X., Li, H., Zhang, X., Qin, X. 2022. "Current Status and Countermeasures of Collaborative Governance of Grassroots Reading Services under the Digital Rural Strategy—A Case Study of 130 Villages in 7 Counties (Cities) of Hubei Province". *Library and Information Service* DOI code: 10.13266/j.issn.0252-3116.2022.03.004